



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Faksimile (021) 3813583, Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B-101/S/KTLN/LN.03.00/04/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Penawaran Pelatihan Singapore Cooperation
Programme (SCP) Tahun 2024/2025 dari
Pemerintah Singapura

18 April 2024

Yth. Pejabat terlampir
di tempat

Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan tawaran untuk mengikuti pelatihan dari Pemerintah Singapura dalam kerangka *Singapore Cooperation Programme* (SCP) Tahun 2024/2025. Program SCP merupakan salah satu program peningkatan kapasitas dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura dengan bidang pelatihan yang ditawarkan, antara lain: *sustainability, public health, resilience building, digitalisation, leadership and governance, trade and economy, connectivity*, dan IMF-ST.

Program-program pelatihan yang akan dilaksanakan secara daring dan luring pada bulan Mei 2024 s.d. Maret 2025 dapat dilihat pada tabel (terlampir). Lebih lanjut, Pemerintah Singapura akan menanggung biaya (parsial/penuh) terkait dengan pelatihan-pelatihan yang ditawarkan. Informasi terkait detail program termasuk pembiayaan masing-masing pelatihan dan pendaftaran *online* dapat di akses melalui tautan www.scp.gov.sg dan <https://ktn.setneg.go.id>.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya masing-masing instansi dapat mengajukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai calon peserta pelatihan yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program pelatihan. Adapun persyaratan dan mekanisme pendaftaran yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Calon peserta telah menjalani masa kerja minimal 3 s.d 5 tahun sesuai dengan bidang pelatihan dan memperhatikan ketentuan pada pelatihan yang dipilih
2. Mahir berbahasa inggris secara lisan dan tulisan
3. Pencalonan peserta agar melampirkan berkas administrasi sebagai berikut:
 - Surat pengantar/rekomendasi dari *focal point* masing-masing instansi yang ditujukan kepada Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri,

Kemensetneg (bagi instansi di daerah harap memperhatikan alur koordinasi dengan kementerian/lembaga pusat yang menaungi);

- Daftar riwayat hidup terbaru;
- Sertifikat Bahasa Inggris terbaru, dengan nilai minimal 450 (TOEFL) atau 5.0 (IELTS) (bukan *TOEFL prediction test*);
- Bukti pengisian formulir aplikasi *online* pada laman masing-masing pelatihan yang dipilih di www.scp.gov.sg.

Guna proses *endorsement* oleh Biro KTLN Kemensetneg, calon peserta wajib mengisi dan menyampaikan berkas pencalonan di atas melalui website KTLN (<https://ktln.setneg.go.id>) sesuai dengan batas waktu masing-masing pelatihan. Petunjuk pengisian *endorsement form* dapat dilihat melalui laman setiap pelatihan SCP 2024/2025 di website KTLN. Ada pun batas waktu penyampaian dokumen untuk *endorsement* dapat di lihat pada masing-masing pelatihan di website KTLN/tabel (terlampir). Apabila terdapat kendala pada pengisian *endorsement form* di *website* KTLN, silakan menghubungi via e-mail ke beasiswa-ktln@setneg.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plh. Kepala Biro Kerja Sama Teknik
Luar Negeri,

#

Arrya Tirto Sumarto

Lampiran Surat Dinas
Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri,
Nomor : B-101/S/KTLN/LN.03.00/04/2024
Tanggal : 18 April 2024

DAFTAR PEJABAT YANG DIKIRIMI SURAT DINAS

1. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
2. Kepala Badan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
3. Sekretaris Jenderal, Dewan Perwakilan Daerah
4. Sekretaris Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat
5. Sekretaris Jenderal, Majelis Permusyawaratan Rakyat
6. Sekretaris Jenderal, Mahkamah Konstitusi
7. Sekretaris Jenderal, Komisi Yudisial
8. Sekretaris Jenderal, Komisi Pemberantasan Korupsi
9. Sekretaris Utama, Badan Narkotika Nasional
10. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
11. Sekretaris Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional
12. Sekretaris Utama, Badan Standardisasi Nasional
13. Sekretaris Utama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
14. Sekretaris Utama, u.p. Kepala Biro, Hukum, SDM dan Organisasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15. Sekretaris Utama, Badan Koordinasi Penanaman Modal
16. Sekretaris Jenderal, Ombudsman Republik Indonesia
17. Sekretaris Jenderal, u.p. Dirkersin Ditjen Strahan, Kementerian Pertahanan
18. Sekretaris Jenderal, u.p Kepala Pusat Kelembagaan Internasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika
19. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian, Kementerian BUMN
20. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga
21. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
22. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Badan SAR Nasional
23. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
24. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Badan Siber dan Sandi Negara
25. Sekretaris Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian
26. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Kabinet
27. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
28. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

29. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
30. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
31. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
32. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
33. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
34. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama
35. Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama, Kementerian Dalam Negeri
36. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
37. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
38. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
39. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
40. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan
41. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN, Kementerian Kesehatan
42. Kepala Biro Kerja Sama, Kementerian Ketenagakerjaan
43. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
44. Kepala Pusat Penelitian, Pelatihan, dan Pengembangan, Komisi Pemilihan Umum
45. Kepala Biro Administrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum
46. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
47. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
48. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Luar Negeri
49. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
50. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
51. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
52. Kepala Biro Organisasi dan SDM, Kementerian Perdagangan
53. Kepala Badan Pengembangan SDM, Kementerian Perhubungan
54. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian
55. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial
56. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Badan Pemeriksa Keuangan
57. Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung
58. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
59. Kepala Pusat Penerangan, Tentara Nasional Republik Indonesia

60. Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia
61. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Badan Kepegawaian Negara
62. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Meteorologi dan Geofisika
63. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
64. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum, Badan Informasi Geospasial
65. Kepala Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan
66. Kepala Biro Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pusat Statistik
67. Kepala Biro SDM dan Umum, Lembaga Administrasi Negara
68. Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
69. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden
70. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum, Badan Pangan Nasional
71. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan